

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif dunia, sudah diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama memainkan suatu peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. UMKM merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi nasional. UMKM juga merupakan usaha yang kuat menghadapi situasi ekonomi yang sulit, terlihat saat krisis ekonomi melanda Indonesia, UMKM tetap mampu bertahan, bahkan UMKM mampu memberikan sumbangan dalam proses *National Economic Recovery* (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2009).

UMKM mampu bertahan walaupun terjadinya krisis karena UMKM memanfaatkan sumberdaya local baik itu sumberdaya manusia, modal, bahan baku dan peralatan. artinya pelaku usaha UMKM tidak mengandalkan barang impor, oleh sebab itu walaupun terjadinya krisis ekonomi UMKM tetap mampu bertahan.

Dalam laporan hasil penelitian oleh World Bank (2006), menunjukkan 99 persen perusahaan negara berkembang di seluruh dunia, dengan pekerja kurang dari 50 orang adalah UMKM. Kategori usaha di sektor ini juga merupakan kesempatan kerja yang paling realistis bagi kalangan menengah ke bawah. Menurut Sensus Ekonomi 2006 (BPS,2006) terlihat bahwa UMKM mendominasi sebesar 99,75 persen, dan hanya 0,19 persen merupakan usaha skala besar.

Dominasi skala usaha mikro sebesar 83,27 persen atau sebanyak 18,933 juta usaha dan 15,81 persen usaha kecil. Ini jelas memberi gambaran bahwa UMKM di Indonesia sangat berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Jika kita melihat dari pelaku ekonomi yang paling kecil yaitu usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendirikan atau mengembangkan sebuah usaha maka seseorang harus memiliki modal walaupun modal tersebut relatif kecil. Biasanya usaha kecil akan melakukan pinjaman kepada sebuah lembaga pemberi pinjaman, baik kepada bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Secara umum lembaga keuangan terbagi atas dua macam yakni lembaga keuangan yang berbasis konvensional dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim masih banyak yang belum mengetahui tentang lembaga keuangan syariah. Mayoritas penduduk Indonesia masih banyak yang menggunakan lembaga keuangan konvensional dengan sistem bunga. Sementara dalam Islam sistem bunga tersebut adalah haram atau tidak diperbolehkan oleh aturan agama, karena itu muncullah lembaga keuangan berbasis syariah.

Dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya terdiri dari bank, tetapi juga terdapat lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu alternatif para pengusaha mikro dalam mendapatkan modal usaha khususnya bagi pengusaha kecil yang mengalami keterbatasan modal. Untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan mikro relatif lebih mudah daripada melakukan pinjaman kredit modal usaha perbankan. Ini terjadi karena untuk mendapatkan pinjaman di perbankan harus menjalani prosedur yang cukup rumit dan harus memiliki jaminan. Sementara dalam lembaga keuangan mikro

untuk mendapatkan pinjaman kredit modal usaha relatif lebih mudah, karena lembaga keuangan mikro bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro yang mengalami permasalahan permodalan. Dan saat ini selain lembaga keuangan mikro konvensional juga telah ada lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah diantaranya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah ini merupakan salah satu usaha dalam mengatasi permasalahan modal yang dapat membantu masyarakat yang berada pada ekonomi menengah kebawah. Namun meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional.

BMT termasuk pada kategori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, disebut informal karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal dari pemerintah / instansi terkait. Kinerja baitul maal wat tamwil hampir sama dengan koperasi dimana di dalamnya terdapat pula berbagai produk baik untuk pengumpulan dana maupun penyaluran dana. Untuk operasionalnya sendiri hampir sama dengan operasional bank Syariah yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, perkembangan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk Baitulmaal Waa Tanwil (BMT) di Indonesia, sangat signifikan dan Deputi Bidang

Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi, Setyo Heriyanto mengatakan berkembangnya BMT di Indonesia, tidak terlepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional, yang tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun, dan jumlah pembiayaan sebesar Rp3,6 triliun dan Setyo Heriyanto menyakini, peran dari BMT merupakan salah satu kekuatan lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat (<http://www.harianterbit.com/hantereekonomi> : di akses tanggal 28 maret 2016).

UMK adalah salah satu jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya di provinsi Sumatera Barat. Dalam kondisi krisis ekonomi yang terjadi saat ini, Usaha mikro dan Kecil (UMK) bisa mempunyai peluang lebih besar untuk bertahan dibanding dengan perusahaan perusahaan besar. Jumlah UMK pun telah berkembang jauh dibanding dengan perusahaan perusahaan besar. Jumlah perusahaan menengah dan besar yang bertahan di Sumatera Barat hanya 0,74 % dari jumlah semua perusahaan di Sumatera Barat, sementara jumlah Usaha Kecil Menengah mencapai 99,26 % (BPS Sumatera Barat, 2014).

Untuk terus meningkatkan jumlah pelaku usaha baik usaha Mikro, Kecil dan Menengah BMT Andalas Perkasa hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan Syariah, yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabahnya. Sasaran utama dari BMT ini adalah melakukan pembiayaan disektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), hal ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan. Sehingga secara tidak langsung

obyek yang mendapatkan pembiayaan adalah orang-orang yang kita sebut dengan istilah *grass root* (masyarakat akar rumput).

Dari berbagai fakta yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan mudharabah tersebut. Adapun judul dari penelitian ini adalah **”Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Andalas Perkasa Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Padang Pariaman”**.

1.2 Perumusan Masalah

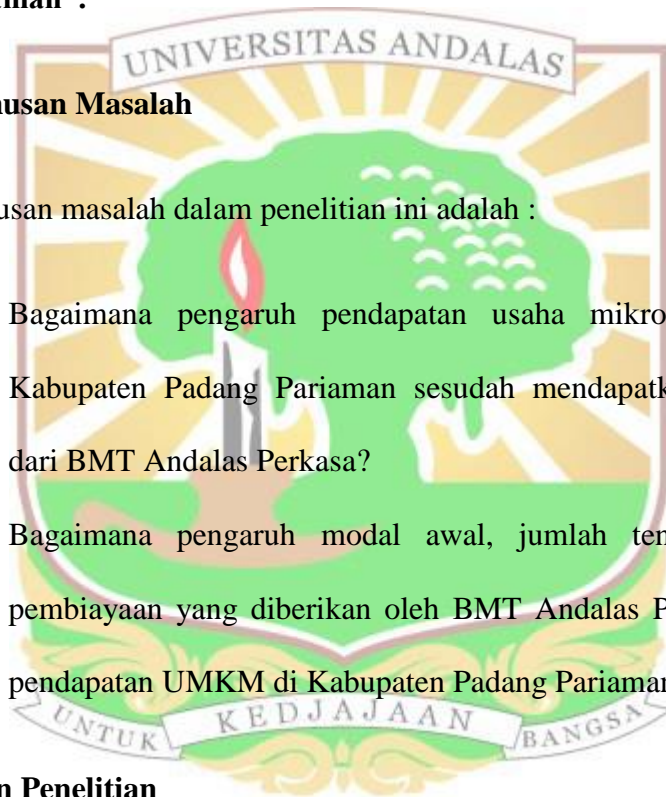
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Padang Pariaman sesudah mendapatkan pembiayaan dari BMT Andalas Perkasa?
2. Bagaimana pengaruh modal awal, jumlah tenaga kerja dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Andalas Perkasa terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, Maka tujuan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh modal awal, jumlah tenaga kerja dan pembiayaan yang diberikan BMT Andalas Perkasa terhadap pendapatan UMK Kabupaten Padang Pariaman.



2. Untuk menganalisis kondisi pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari BMT Andalas Perkasa

1.4 Manfaat Penelitian

2. Bagi penulis, hasil penelitian dapat di jadikan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan untuk pengetahuan tentang perkembangan usaha mikro dan kecil
3. Bagi pelaku UMK, untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro dan kecil melalui informasi akses permodalan yang lebih mudah.
4. Bagi Lembaga keuangan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi lembaga keuangan khususnya BMT Andalas Perkasa serta lembaga keuangan lain yang terkait untuk terus meningkatkan kinerjanya, baik dari aspek pengembangan dan perluasan maupun kualitas dan kuantitas.
5. Bagi pihak yang membutuhkan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dibidang ilmu ekonomi pada umumnya dan pembelajaran berbasis Islam khususnya.
6. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengambil keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibentuk kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

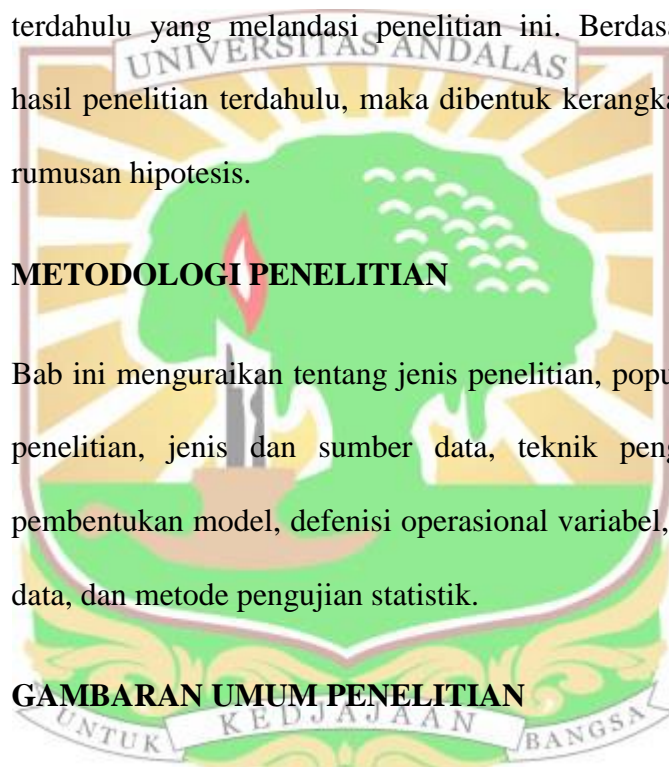
Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pembentukan model, definisi operasional variabel, metode analisis data, dan metode pengujian statistik.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian, keadaan daerah penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil analisa kuesioner, dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pengujian statistik, analisa koefisien regresi dan implikasi kebijakan.



BAB VI PENUTUP

BAB ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran terkait hasil penelitian.

